

PERAN DEMOKRATIS PERPUSTAKAAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN BUDAYA LITERASI INFORMASI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Hari Otang Sasmita¹, Diah Amelia^{2*}, Asima Sitanggang³, Shinta Anggreany⁴

¹ IPB University, ²Politeknik Negeri Media Kreatif, ³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

⁴BPTP Balitbangtan Kalimantan Selatan

Korespondensi: Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan

*Surel: diahamelia@polimedia.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 29/12/2021

Direvisi: 20/01/2022

Dipublikasi: 31/01/2022

e-ISSN: 2721-0995

p-ISSN: 2721-9046

Kata Kunci:

Demokrasi Literasi,
Perpustakaan Nasional,
Strategi Komunikasi,
Covid-19

Keywords:

Literacy Democracy,
National Library,
Communication Strategy,
Covid-19.

ABSTRAK Peran Demokratis Perpustakaan Nasional dalam Peningkatan Budaya Literasi Informasi pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan budaya literasi di masa pandemi Covid-19 melalui analisis pemetaan strategi komunikasi SWOT+PEST. Dengan metode penelitian *desk research analysis*, data dan informasi dari sumber informasi berdasarkan pengamatan di media daring dan buku dipadu dengan deskripsi kualitatif analisa SWOT+PEST ditemukan bahwa perpustakaan dapat dikatakan mampu menekankan peran politik perpustakaan sebagai ujung tombak literasi informasi masyarakat. Tercapainya demokrasi literasi yang kuat dapat membawa pada pembangunan Indonesia yang lebih kuat.

ABSTRACT *The Democratic Role of the National Library in Improving the Culture of Information Literacy During the Covid-19 Pandemic.* This study was conducted to describe the role of the National Library (Perpustakaan Nasional) in improving literacy culture during the Covid-19 pandemic through the analysis of the SWOT+PEST communication strategy. With the desk research analysis method, data and information from observational information sources from online media and books combined with a description of the SWOT+PEST analysis, it was found that libraries can be said to play an important role in increasing public information literacy. The achievement of a strong literacy democracy can lead to a stronger development of Indonesia.

PENDAHULUAN

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di ibu kota negara dan berperan melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kepastakaan dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan penelitian, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Perpustakaan Nasional juga memiliki fungsi pelayanan secara langsung kepada masyarakat luas seperti pelayanan peminjaman buku dan penerbitan ISBN. Keberhasilan literasi dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh peran serta dari Perpustakaan Nasional dalam menyokong keberlanjutan perpustakaan yang ada di daerah.

Situasi ketidakpastian dengan munculnya pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap akses pelayanan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yang mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung. Artinya akses masyarakat terhadap layanan informasi dalam khazanah peningkatan literasi pada masa pandemi Covid-19 menjadi terkendala. Namun demikian, pihak Perpustakaan Nasional berupaya mengatasi permasalahan situasi ketidakpastian ini dengan berbagai inovasi dan strategi untuk tetap berupaya dalam menumbuhkan minat baca serta menarik minat masyarakat untuk tetap dapat meningkatkan literasi pada era pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan dengan melibatkan *stakeholder* yang dilaksanakan seperti kegiatan seminar secara daring (virtual), perlombaan perpustakaan berprestasi, dan pemilihan duta baca serta kegiatan lainnya untuk memberikan motivasi bagi masyarakat agar berperan aktif meningkatkan budaya literasi.

Literasi menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara dan secara langsung berdampak pada pengetahuan masyarakat sehingga budaya literasi menjadi bagian penting dalam sebuah pembangunan. Data Perpustakaan Nasional (Lakip Perpustakaan Nasional 2016) menunjukkan hanya 20 persen ketersediaan perpustakaan secara nasional dengan total 154.359 perpustakaan, sementara kebutuhan hadimya perpustakaan sebesar

767.951 unit perpustakaan. Saat ini hanya tersedia 26 persen perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, sampai desa dan juga perpustakaan komunitas (Pasal 22 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan).

Menurut Priyeti (2017) membaca adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan, dibina, dan dipupuk melalui kegiatan belajar mengajar karena pengetahuan tersebut diperoleh setelah seseorang dilahirkan, bukan keterampilan bawaan. Budaya membaca atau literasi sangat perlu ditingkatkan sebagai upaya mempertahankan komitmen bangsa untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) melalui pengetahuan dari budaya membaca. Budaya literasi juga berperan untuk mengatasi penyebaran hoaks yang ada di masyarakat. Era modern yang ditopang teknologi internet juga menyebabkan arus informasi dan komunikasi menjadi tanpa batas sehingga masyarakat harus siap dengan teknologi yang terbaru. Oleh karena itu, dibutuhkan cara dan upaya dalam memperkuat budaya literasi masyarakat Indonesia, yaitu dengan membuat strategi komunikasi.

Menurut Yohana N. (2018) ada dua alasan kegiatan komunikasi memerlukan strategi, yaitu karena pesan yang disampaikan harus diterima dan mendapatkan respons yang diharapkan dari pesan yang diberikan. Strategi komunikasi digunakan untuk menggambarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threaten*) dengan kemungkinan yang ada atau terjadi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Gambaran analisis tersebut kemudian digunakan untuk memetakan isu, *stakeholder*, media, dan penyusunan program komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi (SWOT+PEST), pemetaan isu, dan *stakeholder* guna mendeskripsikan peran demokratis perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat di masa pandemi.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi

Alberta Education (2021) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan, kepercayaan diri, dan kemauan untuk terlibat dengan bahasa untuk memperoleh, membangun, dan mengomunikasikan makna dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Bahasa dijelaskan sebagai sistem komunikasi yang dibangun secara sosial dan budaya. Sama halnya dengan definisi dari UNESCO (2021), di luar konsep konvensional sebagai seperangkat keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, literasi kini dipahami sebagai sarana identifikasi, pemahaman, interpretasi, kreasi, dan komunikasi di dunia yang semakin digital, diperantarai teks, kaya informasi, dan cepat berubah.

Seperti halnya bahasa Indonesia, literasi atau menjadi melek huruf didefinisikan dalam beberapa cara dan definisi ini terus berkembang. Istilah literasi terkadang hanya mengacu pada aktivitas membaca, atau kegiatan membaca dan menulis, atau aktivitas membaca, menulis, dan berbicara serta mendengarkan. Inglis dan Aers (2008) menyatakan “kebanyakan anak belajar berbicara dengan cukup mudah. Sebaliknya, belajar membaca dan menulis adalah proses yang melelahkan”. Hal ini merupakan kemampuan membaca dan menulis yang membuat seseorang melek dengan berbagai tingkat kefasihan. *National Literacy Trust* mendefinisikan literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan baik. Orang yang melek huruf mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan memahami informasi tertulis.

Perpustakaan

Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 menjelaskan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan informasi, serta rekreasi para pemustaka. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi

sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Sementara itu, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Sebuah demokrasi membutuhkan perpustakaan. Sejak awal, perpustakaan berfungsi sebagai lembaga komunitas penting yang mampu menegakkan, memperkuat, dan mewujudkan beberapa cita-cita demokrasi paling mendasar dari masyarakat. Perpustakaan adalah satu-satunya lembaga negara yang membuat pengetahuan, ide, dan informasi tersedia secara bebas untuk semua warga negara (Kranich, 2001). Perpustakaan adalah tempat orang dapat menemukan pendapat yang berbeda tentang pertanyaan kontroversial dan perbedaan pendapat dari ortodoksi saat ini. Perpustakaan berfungsi sebagai sumber untuk mengejar pemikiran independen, sikap kritis, dan informasi mendalam. Karena itu, perpustakaan menjaga keberadaannya terhadap tirani ketidaktahuan dan kelemahan dari setiap demokrasi.

Publik yang terinformasi merupakan dasar dari demokrasi. Bagaimanapun, demokrasi adalah tentang wacana, yaitu wacana di antara rakyat. Akibatnya, pencarian pengetahuan dan pencerahan diri terletak di jantung demokrasi ini. Artinya, jika masyarakat bebas ingin bertahan, ia harus memastikan pelestarian dan penyediaan pengetahuan yang dapat diakses untuk semua warganya (Kranich, 2001).

Perpustakaan dalam masyarakat demokrasi seperti diamanahkan UUD 1945 melakukan fungsi mendasar, yaitu untuk menjaga agar masyarakat tetap mendapat informasi. Perpustakaan adalah landasan demokrasi dalam komunitas karena perpustakaan membantu masyarakat dalam menemukan keragaman sumber daya dan dalam mengembangkan keterampilan literasi informasi. Seperti yang dikatakan James Madison (Kranich, 2001) menjelaskan bahwa pengetahuan akan selamanya menguasai ketidaktahuan dan siapapun yang bermaksud menentukan dirinya sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuatan yang diberikan oleh pengetahuan.

Sebuah pemerintahan tanpa informasi populer atau sarana untuk memperolehnya hanyalah sebuah prolog dari sebuah lelucon atau tragedi, atau mungkin keduanya.

Strategi Komunikasi

Menurut Kofli (2007) setiap strategi komunikasi berasal dari berbagai asumsi dan mensyaratkan kondisi tertentu yang menjadikan asumsi dan persyaratan tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata di tengah masyarakat dengan kondisi heterogen yang menyebabkan masyarakat terpinggirkan dari sistem komunikasi yang ada. Strategi komunikasi menurut Effendi dalam Surahmi dan Farid (2018) adalah sebuah panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, sehingga sebuah strategi komunikasi diharapkan dapat memperlihatkan pelaksanaan taktis yang harus dilakukan. Pendekatan yang diberikan akan berbeda-beda disesuaikan dengan waktu, situasi, dan kondisi.

Dalam membuat strategi komunikasi, peran komunikator berperan penting. Komunikator menentukan cara penyampaian pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Selain komunikator, media yang digunakan dalam membuat strategi komunikasi juga menjadi pertimbangan penting yang disesuaikan dengan tujuan dari proyek, sasaran proyek, dan seberapa besar dampak yang diharapkan saat dan setelah proyek berlangsung. Oleh karena itu, untuk membuat strategi komunikasi yang tepat dibutuhkan perencanaan yang matang, pemilihan komunikator dan media yang tepat, target dan tujuan yang jelas sehingga memenuhi tujuan pembuatan strategi komunikasi yang direncanakan.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan *desk research analysis*, yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada materi yang diterbitkan dalam laporan dan dokumen serupa yang tersedia di Perpustakaan Nasional, situs web, dan data yang diperoleh dari survei. Sumber data yang ada dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Perpustakaan Nasional dan diskusi mendalam dengan tim peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Situasi Perpustakaan Nasional

Fungsi budaya literasi untuk bangsa Indonesia sangat penting karena tingkat literasi masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh CCSU pada 2016 mendapat peringkat 60 dari 61 negara. Selain itu, Unesco menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Sementara itu, berdasarkan pemeringkatan *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada 2016, Indonesia menempati peringkat 69 dari 76 negara dengan skor membaca di bawah rata-rata yakni 396, dengan kecenderungan meningkat 2,3 poin per tahun, dan pada 2019 menempati peringkat 62 dari 70 negara. Sementara itu, berdasarkan kajian Perpustakaan Nasional pada 2015 mengenai minat baca masyarakat Indonesia memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai minat baca yang belum optimal dengan skala nilai 25,3 persen. Namun, dibalik semua ketertinggalan tersebut, Indonesia mempunyai peluang besar untuk bersaing dengan negara-negara maju. *World Economic Forum (WEF)* melalui *World Competitive Index (WCI)* yang dilakukan pada 2016, menempatkan Indonesia pada urutan ke-41 dari 138 negara dengan kecenderungan meningkat.

Upaya peningkatan budaya baca harus dilakukan secara terstruktur dan komprehensif dengan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan beberapa variabel seperti rasio buku yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk, fasilitas yang tersedia dalam perpustakaan dan taman bacaan, kapasitas maksimal dari perusahaan penerbitan, para penulis, toko buku yang ada, dan tersedianya akses internet, serta proses digitalisasi perpustakaan berbasis web, distribusi dengan tujuan meminimalkan kesenjangan antarwilayah, dan kemampuan daya beli masyarakat, serta lingkungan yang sesuai.

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Perpustakaan Nasional Tahun 2020—2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi penting dalam pembangunan sumber daya manusia

yang berkelanjutan. Berdasarkan Survei BPS 2019 diketahui bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan, mengingat nilai budaya literasi Indonesia pada 2019 baru mencapai 55,03 persen. Arah kebijakan dalam rangka pembangunan perpustakaan pada 2021, yaitu:

1. mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
2. meningkatkan budaya gemar membaca;
3. meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno.

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan tersebut dengan mengacu prioritas nasional pada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui kegiatan prioritas peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, maka dituangkan melalui Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Tahun 2021, yaitu (1) peningkatan budaya literasi; (2) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; (3) pengembangan perbukuan dan dengan sasaran proyek prioritas, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan kajian kondisi literasi, undang-undang, rencana strategis dan arah kebijakan pembangunan perpustakaan tahun 2021 tersebut, setidaknya terdapat 10 isu utama yang dihadapi Perpustakaan Nasional dari yang berdampak tinggi hingga rendah, yaitu isu politik pada kebijakan nasional, politik anggaran, rendahnya jumlah pustakawan, rendahnya tingkat literasi nasional, ancaman *cybercrime*, belum disahkannya RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), koleksi format digital, infrastruktur layanan daring masih belum optimal, ancaman krisis energi, dan ancaman krisis ekonomi.

Pada isu kebijakan nasional, renstra Perpustakaan Nasional akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat sehingga jika prioritas kebijakan nasional berubah maka akan berdampak pada prioritas pembangunan literasi masyarakat. Selain dipengaruhi prioritas kebijakan nasional, alokasi anggaran pun ditentukan oleh politik anggaran di DPR melalui komisi X. Tentunya alokasi anggaran

yang akan disetujui DPR akan dipengaruhi postur APBN dan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 1. Penetapan Isu

Peluang Kemunculan	Dampak Bisnis		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Tinggi	-	Rendahnya tingkat Literasi Nasional (S)	Kebijakan Politik Nasional (P) Politik Anggaran (E)
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah koleksi digital terbatas (T) Server layanan online masih rendah (T) 	<i>Cybercrime</i> (T)	Rendahnya jumlah pustakawan (S)
Rendah	<ol style="list-style-type: none"> Ancaman Krisis Energi (P) Krisis ekonomi (E) 	RUU EBT (P)	-

Keberadaan pustakawan menjadi penting. Pelayanan dalam bentuk pendampingan pada tingkat kompetensi pustakawan tidak boleh terbatas karena dapat mengakibatkan tidak terlayannya dengan optimal program peningkatan budaya literasi dari sisi perpustakaan. Menurut standar IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*), rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum 1:2.500, artinya maksimal 1 orang pustakawan untuk melayani 2.500 orang penduduk. Isu ini tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama untuk dapat mendorong masyarakat lebih meningkatkan minat baca dan literasi. Isu inilah yang menjadi program prioritas utama Perpustakaan Nasional Tahun 2021.

Pada saat Perpustakaan Nasional bertransformasi memberikan pelayanan melalui teknologi digital yang didorong oleh semangat inklusivitas dan adanya situasi pandemi Covid-19, tentunya upaya tersebut sangat diapresiasi dengan baik. Pasalnya dengan memberikan layanan perpustakaan berbasis digital dan *mobile*, kesenjangan akses pada sumber ilmu pengetahuan yang selama ini cukup lebar, harapannya dapat

diminimalkan. Namun demikian, teknologi tidak bebas nilai, ancaman *cybercrime* dengan berbagai modus merupakan isu utama yang harus diperhatikan oleh pemberi layanan seperti Perpustakaan Nasional. Pasalnya tingkat keamanan yang rendah pada layanan yang disediakan Perpustakaan Nasional dapat menyebabkan terkendalanya layanan pada kemudian hari. Selain *cybercrime*, layanan berbasis internet tentu sampai kapanpun akan membutuhkan energi listrik.

Isu krisis energi berbasis fosil menjadi ancaman bersama pada masa depan sehingga layanan yang berbasis internet tentu akan mengalami permasalahan pada masa depan ketika dunia mengalami krisis energi. Untuk itu, Perpustakaan Nasional dan semua masyarakat di Indonesia menunggu Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang dapat menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan energi pada masa depan.

Terakhir adalah isu krisis ekonomi, sama halnya ketika pandemi Covid-19 ini melanda dunia, Indonesia pun mengalami tekanan yang sangat berat sehingga kondisi ekonomi masyarakat menjadi terganggu dan mengakibatkan lemahnya kemampuan daya beli masyarakat. Dampaknya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan literasi yang disediakan institusi seperti perpustakaan.

Peran Perpustakaan Nasional dalam Peningkatan Budaya Literasi

Menyikapi pandemi Covid-19, ada perubahan strategis yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk terus beroperasi seperti seputar kepemimpinan dan pengambilan keputusan perpustakaan, penanganan Covid-19, alokasi dan pemotongan anggaran, perolehan koleksi, dan pergantian personel. Pandemi Covid-19 memperkuat dan mempercepat tren dalam investasi perpustakaan menuju sumber daya dan layanan digital. Bahkan, sebelum pandemi, Perpustakaan Nasional sudah lebih signifikan dalam membeli dan melisensikan koleksi digital dari waktu ke waktu bersama dengan investasi tambahan dalam layanan virtual untuk jangka panjang. Dalam lima tahun, alokasi anggaran mereka untuk jurnal dan *online database*, *e-book*,

dan *streaming media* meningkat, sementara investasi pada sumber daya cetak menurun.

Dalam rangka peningkatan budaya literasi dan budaya baca masyarakat, Perpustakaan Nasional adalah lembaga yang memiliki tugas utama salah satunya adalah meningkatkan literasi masyarakat, termasuk budaya baca masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional (Oktober 2021), dijelaskan bahwa Perpustakaan Nasional berupaya dengan segenap sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan amanah undang-undang terkait fungsi, tugas, dan tujuan Perpustakaan Nasional termasuk strategi dalam meningkatkan budaya literasi dan budaya baca masyarakat.

Tidak dipungkiri berdasarkan data di atas bahwa tingkat literasi dan budaya baca masyarakat Indonesia masuk kelompok rendah yang dapat menyebabkan rendahnya modal manusia Indonesia (*Human Capital Index*) dan akan berakibat pada menurunkan daya saring, daya saing, dan daya sanding bangsa pada tingkat global.

Berdasarkan kajian rilis data dari CCSU, PISA (OECD), Unesco, dan wawancara, diperoleh beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai unsur strategi kebijakan komunikasi Perpustakaan Nasional terkait upaya peningkatan literasi dan budaya baca masyarakat.

	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGGI	Kepolisian	BRIN Kemenkominfo Kemendikbud Ristek Kementerian Koordinator Bidang PMK	Presiden Komisi X DPR Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah
SEDANG		Penerbit Perguruan Tinggi Sekolah Madrasah	Media Massa LSM
RENDAH		Perusahaan Swasta Internet Service provider	Masyarakat

Tingkat Kepentingan

Gambar 1. Pemetaan *Stakeholder* Utama (Kekuasaan vs Kepentingan)

Berdasarkan analisis situasi SWOT+PEST, pemetaan isu, dan status Perpustakaan Nasional, faktor-faktor utama yang memengaruhi perkembangan budaya literasi masyarakat nasional telah diidentifikasi dan diringkas seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Dalam situasi tersebut, rencana kerja Perpustakaan Nasional pada 2021 seperti yang telah dinyatakan di atas memfokuskan pada tiga program, yaitu peningkatan budaya literasi, peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan pengembangan perbukuan dengan sasaran proyek prioritas, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Namun, secara umum tujuan komunikasi melalui Program Prioritas Perpustakaan Nasional pada 2021 sebagai berikut:

1. peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter dengan target kenaikan indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 12 pada skala 0—100;
2. pengembangan budaya kegemaran membaca dengan indikator jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi sebesar 32.249.

Program prioritas tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk implementasi budaya literasi seperti pada Tabel 2 yang tertuang dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2020—2024.

Tabel 2. Tahapan Implementasi Komunikasi Budaya Literasi

Tujuan	Arahan Komunikasi	Konten Produk Komunikasi
<i>Fase 1 Awareness</i> <i>Membangun kesadaran masyarakat bahwa budaya literasi adalah milik seluruh rakyat Indonesia</i>	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari sisi Pendidikan dan minat baca	Konvensional dan Media Sosial
<i>Fase 2 Engagement</i> <i>Meningkatkan keterlibatan masyarakat</i>	Menyebarkan tokoh yang telah memberikan dukungan nyata.	Luring dan daring
<i>Fase 3 Call to Action</i> <i>Mengajak dan memprovokasi masyarakat</i>	Memicu aksi nyata	Program-program Perpustakaan Nasional yang melibatkan masyarakat seperti seminar dan lomba

Fase 4 Event <i>Memfasilitasi untuk mendukung</i>	Menjelaskan pentingnya Perpustakaan Nasional	Menyediakan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang kesulitan mengakses buku
Fase 5 Post Event <i>Menciptakan promosi dan menyebarkan informasi dan berita positif</i>	Menjelaskan adanya kisah sukses pembaca	Konvensional dan media sosial

Sumber: Diskusi Tim Peneliti

Penentuan khalayak menjadi bagian penting dalam menyusun strategi komunikasi karena khalayaklah tujuan utama strategi komunikasi dilakukan. Khalayak sasaran pada strategi komunikasi Perpustakaan Nasional pada program kerja 2021 dibagi ke dalam tiga basis *stakeholder*, yaitu pemerintah, lembaga pemerintah, dan nonpemerintah yang terdiri atas masyarakat, media, akademisi pakar, dan dunia usaha. Dalam menyusun strategi komunikasi pada peningkatan budaya literasi di masa pandemi Covid-19 oleh Perpustakaan Nasional, setidaknya dapat diidentifikasi lima *stakeholder* terkait, yaitu pemerintah, akademisi/pakar, masyarakat, media massa, dan dunia usaha. Media komunikasi yang digunakan terkait strategi peningkatan budaya literasi tersebut antara media daring lewat media sosial dan portal resmi Perpustakaan Nasional, media massa, dan kegiatan secara langsung. Beberapa strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional di antaranya edukasi tentang peran perpustakaan di era pandemi, diseminasi inovasi, teknologi dan layanan perpustakaan, diseminasi informasi tentang peran perpustakaan di era pandemi, dan membangun komunikasi yang atraktif antara Perpustakaan Nasional dan masyarakat di media sosial.

Tabel 3. Strategi Komunikasi Eksternal Perpustakaan Nasional dalam Meningkatkan Budaya Literasi Nasional

Tujuan Komunikasi	Pesan Kunci	Khalayak Sasaran	Media Komunikasi (P/E/S/O)	Taktik Komunikasi	Monitoring dan Evaluasi
A. Government Relation					
1. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang program gerakan literasi nasional	Bekerjasama dalam membangun literasi masyarakat	1. Kemendikbud Ristek 2. Kemenkominfo 3. Kemenkeu 4. Kemenko PMK 5. Bappenas 6. Kemenkeu 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Daerah 9. Dinas Pendidikan Daerah	1. <i>Direct Lobbying</i> 2. Surat atau e-mail 3. FGD 4. Konsultasi Publik	Koordinasi, komunikasi, dan lobi politik dalam merancang roadmap gerakan nasional literasi nasional	Respon terhadap peta jalan gerakan literasi nasional melalui media sosial dan aplikasi <i>chatting</i>
2. Meningkatkan jumlah pustakawan	Terlaksananya kebutuhan jumlah pustakawan yang memadai	1. Kemenpan	Usulan melalui perka Perpustakaan Nasional kepada Menpan	Koordinasi dan komunikasi	Respon terhadap usulan formasi pustakawan pada tahun usulan
3. Meningkatkan kemampuan layanan <i>online</i> dan koleksi digital	Tercapainya transformasi layanan <i>online</i> yang baik dan handal	1. Pemerintah 2. Komisi X DPR-RI	1. <i>Direct Lobbying</i> 2. Surat atau e-mail 3. Rapat Dengar Pendapat 4. Konsultasi Publik	Koordinasi, komunikasi, dan lobi politik dalam merancang usulan peningkatan layanan <i>online</i> Perpustakaan Nasional	Respon terhadap urgensi peningkatan layanan Perpustakaan Nasional <i>online</i> dalam kebutuhannya bertransformasi
B. Community Relations					
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman	Gemar baca, <i>read me a book</i>	1. Pemustaka 2. Masyarakat 3. Anak sekolah 4. LSM	1. Media massa 2. Media Sosial: - Youtube - Instagram	1. Penggunaan KOL dalam suatu even	1. Respon masyarakat melalui like

<p>masyarakat pentingnya budaya literasi informasi</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Twitter - Facebook 3. Laman Perpustakaan Nasional 4. Radio Perpustakaan Nasional 5. Duta Baca 6. <i>Direct Event</i> 7. Brosur 8. Poster 	<p>kampanye dan promosi gemar baca</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat event yang edutainment pada tema gemar baca 3. Publikasi kampanye dan event gemar baca secara rapid dan banyak semua platform <i>owned media</i> 	<p>comment dan view pada media sosial serta event</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tren jumlah keanggotaan ke Perpustakaan Nasional 3. tren jumlah peminjaman buku 4. Jumlah partisipan dalam event dan kampanye
<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan budaya kegemaran membaca 	<p>Gemar baca, <i>read me a book</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemustaka 2. Masyarakat 3. Anak sekolah 4. LSM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media massa 2. Media Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Youtube - Instagram - Twitter - Facebook 3. Laman Perpustakaan Nasional 4. Radio Perpustakaan Nasional 5. Duta Baca 6. <i>Direct Event</i> 7. Brosur 8. Poster 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan KOL dalam suatu <i>event</i> kampanye dan promosi gemar baca 2. Membuat event yang edutainment pada tema gemar baca 3. Publikasi kampanye dan <i>event</i> gemar baca secara rapid dan banyak semua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon masyarakat melalui <i>like comment</i> dan <i>view</i> pada media sosial serta <i>event</i> 2. Tren jumlah keanggotaan ke Perpustakaan Nasional 3. Tren jumlah peminjaman buku 4. Jumlah orang yang mengikuti

				platform <i>owned media</i>	kegiatan pengembang an budaya literasi
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar	#ayokePerpustakaan Nasional #sahabatPerpustakaan Nasional	1. Pemustaka 2. Masyarakat 3. Anak sekolah 4. LSM	1. Media massa 2. Media Sosial: - Youtube - Instagram - Facebook 3. Laman Perpustakaan Nasional 4. Radio Perpustakaan Nasional 5. Duta Baca 6. <i>Direct Event</i> 7. Brosur 8. Poster	Setiap publikasi di media sosial yang berkaitan dengan gemar baca ditambahkan hashtag #ayokePerpustakaan Nasional #sahabatPerpustakaan Nasional	1. Respon masyarakat melalui <i>like comment</i> dan <i>view</i> pada media sosial serta event 2. Tren jumlah keanggotaan ke Perpustakaan Nasional 3. tren jumlah peminjaman buku 4. Jumlah partisipan dalam <i>event</i> dan kampanye
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman layanan perpustakaan online	iPusnas, E-res, OPAC, dan IOS	1. Pemustaka 2. Masyarakat 3. Anak sekolah 4. LSM	1. Media Sosial 2. Media Sosial: - Youtube - Instagram - Twitter - Facebook 3. Website Perpustakaan Nasional 4. Radio Perpustakaan Nasional 5. Duta Baca 6. <i>Direct Event</i> 7. Brosur	Pemberian informasi terkait berbagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi berbasis inklusi	1. Respon masyarakat melalui <i>like comment</i> dan <i>view</i> pada media sosial serta <i>event</i> 5. Tren jumlah keanggotaan ke

			8. Poster		Perpustakaan Nasional 6. Tren jumlah peminjaman buku 7. Tren Jumlah unduhan dan peminjaman via iPusnas 8. Tren kunjungan via E-Res 9. Tren jumlah kunjungan via OPAC 10. Tren pencarian via IOS
C. Media Relations					
1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya literasi	Mengajak masyarakat untuk gemar membaca	1. Media massa yang memiliki kanal pendidikan dan kebudayaan 2. Organisasi media seperti: PWI, AJI, IJTI, AMSI, PRRSNI	1. Siaran pers 2. Artikel 3. Media Sosial: - Youtube - Instagram - Twitter - Facebook 4. Laman Perpustakaan Nasional 5. Radio Perpustakaan Nasional 6. <i>Video Conference</i>	1. Pemberian edukasi dan informasi terkait literasi informasi 2. Pemberian edukasi dan informasi terkait budaya baca 3. Penyampaian program-program literasi informasi di	Media Monitoring

				masa pandemi secara berkala	
2. Memberikan pengetahuan dan informasi tentang kegemaran budaya baca	Ayo gemar membaca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media massa yang memiliki kanal pendidikan dan kebudayaan 2. Organisasi media seperti: PWI, AJI, IJTI, AMSI, PRRSNI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaran pers 2. Artikel 3. Media Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Youtube - Instagram - Twitter - Facebook 4. Website Perpustakaan Nasional 5. Radio Perpustakaan Nasional 6. <i>Video Conference</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pengetahuan dan informasi tentang kegemaran budaya baca 2. Menyajikan cerita <i>human interest</i> tentang kisah-kisah pejuang dalam kegemaran budaya baca 	Media Monitoring
3. Memberikan informasi layanan-layanan Perpustakaan Nasional	Ayo ke perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media massa yang memiliki kanal pendidikan dan kebudayaan 2. Organisasi media seperti: PWI, AJI, IJTI, AMSI, PRRSNI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaran pers 2. Artikel 3. Media Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Youtube - Instagram - Twitter - Facebook 4. Website Perpustakaan Nasional 5. Radio Perpustakaan Nasional 6. <i>Video Conference</i> 	Pemberian informasi tentang layanan-layanan yang dapat diakses masyarakat	Media Monitoring

SIMPULAN

Berdasarkan analisis model SWOT-PEST dan pemetaan isu, dari sudut pandang faktor internal keuntungannya sangat jelas dalam beberapa hal, seperti dukungan

kebijakan nasional dan jaminan undang-undang perpustakaan, sumberdaya, dan kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi merupakan modal yang dimiliki Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perpustakaan merupakan komponen penting dari lembaga demokrasi dalam masyarakat demokratis Indonesia dan sejumlah besar kegiatan yang terungkap di dalamnya yang terkait dengan peningkatan budaya literasi informasi.

Peningkatan budaya literasi informasi menjadi penting untuk meningkatkan pemustaka berpartisipasi di masyarakat. Misalnya, bagaimana masyarakat memengaruhi dan menghadapi keputusan penting mengenai suatu kebijakan, peraturan, dan undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan bukti bekerjanya literasi informasi. Deskripsi ini dengan demikian memberikan kontribusi bahwa strategi komunikasi perpustakaan dalam meningkatkan budaya literasi baik secara langsung maupun tidak langsung mampu mendorong masyarakat menggunakan kemampuan literasinya dalam diskusi teoretis empiris berbasis literasi informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif politik, keuntungan berdampingan dengan kerugian dalam hal kebijakan peningkatan literasi nasional yang menunjukkan bahwa beberapa *stakeholder* pemerintahan selain Perpustakaan Nasional juga memegang posisi dominan di masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Saat ini, Indonesia belum memiliki peta jalan program literasi nasional yang padu, sinergi, komprehensif, dan berbasis inklusi sosial antarlembaga negara sehingga program-program peningkatan budaya literasi dan budaya baca masyarakat berjalan sendiri-sendiri antarkementerian dan lembaga.

Secara ekonomi, perkembangan ekonomi nasional yang baik telah mendorong kemajuan industri digital dan industri ini memiliki masa depan yang cerah. Perkembangan ekonomi dapat meningkatkan budaya literasi dan pada siklusnya budaya literasi yang tinggi dapat meningkatkan ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa krisis ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakpastian wabah menyebabkan pemotongan anggaran pada Perpustakaan Nasional pada 2020 dan

tentunya berdampak pada pelayanan perpustakaan sebagai lembaga demokrasi yang melayani penyediaan sumber ilmu pengetahuan dan literasi informasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Andersson, Jenny. (2010). *The Library and the Workshop: Social Democracy and Capitalism in the Knowledge Age*. Stanford University Press.
- Andunson, R. et.al. (2018). Public libraries as an Infrastructure for a Sustainable Publicsphere on Democracy and Libraries. *Journal of Documentation* 75(4), 2019 pp. 773—790. DOI: 10.1108/JD-10-2018-0157.
- Arnove, Robert F dan Graff, Harvey J. (1987). *National Literacy Campaigns: Historical and Comparative Perspectives*. Springer.
- Belshaw, Douglas, A. J. (2011). *What is Digital Literacy? A Pragmatic Investigation, Thesis*. United Kingdom.
- Buschman, John. (2018). *On Democracy and Libraries*. *Library Quarterly: Information, Community, Policy*, 88(1), pp. 23—40.
- Davies, Sarah. (2015). Spotlight on Digital Capabilities: <http://digitalcapability.jiscinvolve.org/wp/2015/06/05/spotlight-on-digital-capabilities/>, diakses pada 3 Desember 2021
- Ignatow, G. et.al. (2012). *Public Libraries and Democratization in Three Developing Countries: Exploring the Role of Social Capital*. *Libri*, Vol. 62, pp. 67–80. DOI: 10.1515/libri-2012-0005
- Kalianda D. (2018). *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (dlh) dalam Mengimplementasikan Program Green City di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. *JOM FISIP* 5(1), 1—12.
- Kranich, Nancy. (2001). *Libraries Democracy the Cornerstones of Liberty*. American Library Association. Chicago and London.
- Kifli G. C. (2017). *Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 25(2), 117—125.
- Maulana, Murad. 2015. *Definisi, Manfaat dan Elemen Penting Literasi Digital*. Academia. OECD (2021), *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en>.
- Mose, Peter. (2018). *Libraries and User Culture: Literacy and Development Implications*. Library Management. Emerald Publishing Limited. DOI: 10.1108/LM-01-2018-0004.
- PISA. (2018). *Programme for International Student Assessment (PISA) Results from PISA 2018: Indonesia-Country Note - PISA 2018 Results*.
- Priyetti. (2017). *Usaha Meningkatkan Minat Baca Mahasiswa*. *Jurnal Pustaka Budaya* 4 (1), 55—67.

- Purwahida, Rahmah dan Zulfa Sabila. (2021). Literasi Sastra di SMA Melalui Kajian Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik di Novel Si Anak Pemberani Karangan Tere Liye. *Jurnal Mediasi* 2(3), 267—288.
- Simarmata, et al. (2021). *Literasi Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Surahmi A. dan Farid M. (2018). Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 7(2), 232—339.
- Wheeler, Steve. (2012). *Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Cultures*. eLC Research Paper Series, 5, 14—25.
- Yohana N. (2018). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Mengimplementasikan Program Green City di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP* 5(1), 1—12.

Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Perka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020—2024.

Perka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015—2019.

Perpustakaan Nasional. 2021. Rencana Kerja TA 2021 Perpustakaan Nasional RI.